

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Sepanjang penelusuran penulis mengenai judul ini, memang telah banyak yang melakukan penelitian mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap perkembangan sosial ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah di suatu daerah tertentu. Namun, yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya ialah pada konsep tempat terselenggaranya pemekaran wilayah ini. Penulis belum mendapatkan penelitian tentang dampak pemekaran di Kabupaten Ciamis terhadap perkembangan sosial ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

##### **2.1.1 Pemekaran Wilayah**

###### **2.1.1.1 Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang diserahkan tersebut, mencakup semua kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah (Saragih, 2003).

Menurut Abe dalam Agusniar (2006), desentralisasi dapat memberi sisi positif:

1. Bagi pemerintah pusat desentralisasi tentu akan menjadi jalan yang mengurangi beban pusat.
2. Program atau rencana-rencana pembangunan yang hendak diwujudkan akan lebih realistis, lebih mengena dan lebih dekat dengan kebutuhan lokal.
3. Memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk belajar mengurus rumah tangganya sendiri dan dengan demikian belajar untuk bisa menangkap dan merumuskan aspirasi masyarakat setempat.
4. Dengan adanya pemberian kewenangan maka berarti akan membuka peluang bagi keterlibatan rakyat dalam mengontrol jalannya pemerintahan.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah tersebut menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Otonomi daerah memberikan pengertian bahwa bidang dan jenis kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom untuk diatur dan diurus sendiri (Saragih, 2003).

#### **2.1.1.2 Pengertian Pemekaran Wilayah**

Menurut J. Kaloh dalam bukunya bahwa, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pembagian wilayah harus sejalan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, daerah

kabupaten dan kota yang bersifat otonom. Namun, menurut J. Kaloh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tersebut seharusnya berbunyi: dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk di daerah provinsi dan di wilayah provinsi dibentuk daerah kabupaten dan daerah kota.

Pemerintahan wilayah beserta masyarakat akan semakin memainkan peran yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan jika ditinjau dari aspek penyelenggaraan otonomi luas. Semakin pentingnya kedudukan wilayah dalam menentukan kemampuan daya saing wilayah dalam era global ini, menunjukkan semakin penting dan mendesaknya pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Serta semakin nyata pula tuntutan perbaikan mutu dan keterpaduan perencanaan pembangunan wilayah atau daerah sebagai jembatan untuk mengaktualisasikan kepentingan lokal maupun kepentingan nasional dalam pembangunan. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan otonomi luas. Untuk menjawab semua tuntutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dari masyarakat, pemerintah kemudian melakukan pemekaran wilayah yang dalam hal ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Dalam konteks pemekaran daerah atau yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, daerah otonom tersebut diharapkan

mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.

Dinamika perkembangan wilayah menjadi otonom seperti itu disikapi pemerintah pusat dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak Januari 2001. Dalam hubungannya dengan pembentukan wilayah atau daerah otonom, seperti dalam pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan provinsi akan dibagi dalam daerah kota dan daerah kabupaten. Untuk mendukung otonomi daerah, pemerintah telah mempersiapkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dipertegas dalam pemerintah nomor 129 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Walaupun Undang-Undang tersebut telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam bab II pasal 4 sampai dengan pasal 8 menyatakan tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus.

Pembentukan dan pemekaran daerah adalah sebuah format pengaturan politik dalam penataan hubungan pusat dan daerah di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penataan ini telah melahirkan suatu

komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan bahwa otonomi daerah merupakan format pengaturan politik yang tidak bisa ditawar-tawar dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemekaran daerah menjadi provinsi, kabupaten dan kota dapat dilihat dari tiga sisi logika, yaitu:

1. Logika formal, memandang bahwa terjadinya pemekaran wilayah disebabkan adanya dukungan formal Undang-Undang, sekaligus dengan Undang-Undang ini memberikan peluang kepada setiap daerah untuk berapresiasi dengan kesempatan ini, sehingga yang terjadi adalah banyak daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadikan daerahnya masing-masing menjadi daerah otonom.
2. Logika realitas, memandang bahwa pembentukan daerah merupakan sesuatu yang benar-benar *urgent* secara realitas. Untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang ada di daerah, alternatif pilihan terbaiknya hanyalah pembentukan dan pemekaran wilayah atau daerah.
3. Logika politik, memandang bahwa adanya pergerakan-pergerakan sosial politik kemasyarakatan di tingkat lokal dengan ide pemekaran daerah dan pada saat bersamaan dengan membawa dan mengusung etnisitas daerah sebagai penguat menuju terjadinya pemekaran.

### **2.1.1.3 Konsep Pemekaran Wilayah**

Secara prinsipil, kewenangan yang diberikan kepada suatu organisasi pemerintahan yang dimaksud untuk memaksimalkan fungsi-fungsi utama pemerintah, yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Dalam

menjalankan fungsi-fungsi tersebut dilakukan pendekatan pembangunan wilayah. Rasyid dalam Lumbessy (2005) mengemukakan bahwa “jika pembangunan atau pemekaran wilayah pemerintahan akan dilakukan, maka kebijakan itu harus memberi jaminan bahwa aparaturnya yang ada memiliki kemampuan yang cukup untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan”. Asumsi yang dapat dikemukakan adalah pemekaran wilayah pemerintah yang memperluas jangkauan pelayanan itu akan menciptakan dorongan-dorongan baru dalam masyarakat bagi lahirnya prakarsa yang mandiri dalam menuju kemandirian bersama.

Daerah yang wilayahnya relatif luas, sehingga jangkauan bagi pemerintah untuk melayani warga masyarakat dipandang perlu untuk dimekarkan menjadi beberapa daerah otonom. Pemekaran daerah otonom haruslah mengacu pada beberapa aspek dan pertimbangan yang mengacu pada berbagai aspek dan pertimbangan yang memungkinkan daerah dapat mengimplementasikan kebijakan otonom daerah. Pemekaran daerah tidak lain bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pemekaran wilayah merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan utilitas rakyat atau memperbaiki kesejahteraan di daerah itu. Di dalam PP No. 129 Tahun 2000 tentang pemekaran, pembentukan,

penghapusan dan penggabungan daerah baru dijelaskan bahwa pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam PP ini juga dinyatakan bahwa pembentukan daerah baru didasarkan pada beberapa syarat, yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya dan sosial politik. Salah satu cara untuk melihat perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah atau melihat cerminan hasil usaha perekonomian yang berlangsung di suatu daerah dapat diukur dari:

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
3. Tingkat pendidikan
4. Tingkat kemiskinan
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

## **2.1.2 Tingkat Pendidikan**

### **2.1.2.1 Pengertian Pendidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapat, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.

Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukkan presentase penduduk usia 7 – 12 tahun yang masih terlibat dalam sistem persekolahan. Adakalanya penduduk usia 7 – 12 tahun belum sama sekali menikmati pendidikan, tetapi ada sebaian kecil dari kelompok mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat sekolah dasar.

2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat dalam pembangunan. Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri yakni merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

### 3. Angka Melek Huruf

Salah satu variabel yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya presentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Adapun kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

### 4. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti.

## **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Nurlan Darise (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Selain itu, sumber pendapatan daerah yang sah antara lain mencakup:

1. Hibah/bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanguulangan korban/kerusakan akibat bencana alam dan krisis solvabilitas.
3. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah
5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

### **2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Penerimaan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

#### **1. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah untuk Kabupaten/Kota antara lain:

##### **a. Pajak restoran**

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ketring.

##### **b. Pajak hiburan**

Pajak hiburan adalah pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

c. Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas semua penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

d. Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

e. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.

f. Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Daerah Kabupaten atau Kota diberi peluang untuk dapat menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menentukan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan probadi atau golongan. Jenis pendapatan retribusi Kabupaten atau Kota meliputi objek pendapatan adalah:

- a. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- b. Retribusi pelayanan pasar
- c. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
- d. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- e. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- f. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga

### 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian, dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah.

Dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004, jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN)
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

### 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis pendapatan ini meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

## **2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi**

### **2.1.4.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Zaris, (1987) pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto per kapita (PDRB per kapita). Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 1994).

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai *riil*, artinya dinyatakan dalam harga konstan (Tarigan, 2005). Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga ditentukan oleh seberapa besar terjadi *transfer-payment*, yaitu

bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

Boediono dalam Tarigan (2005) menjelaskan bahwa “Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang”. Jadi, presentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari presentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut.

#### **2.1.4.2 Proses Pertumbuhan Ekonomi**

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tergantung pada sumber daya alamnya, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi dan sebagainya (Jhingan, 2004).

##### **1. Faktor Ekonomi**

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Beberapa faktor ekonomi tersebut diantaranya:

##### **a. Sumber Alam**

Faktor produksi kedua adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang penting antara lain minyak-minyak, gas, hutan, air dan bahan-bahan mineral lainnya.

##### **b. Akumulasi Modal**

Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi.

c. Organisasi

Organisasi bersifat melengkapi dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaruan atau hasil dari teknik penelitian baru.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

2. Faktor Non Ekonomi

Faktor non ekonomi bersama-sama saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor non ekonomi juga memiliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor non ekonomi diantaranya:

a. Faktor Sosial

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Kualitas input tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi.

c. Faktor Politik dan Administratif

Struktur politik dan administratif yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang.

Administrasi yang kuat, efisien dan tidak korup, dengan demikian amat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.4.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

.Adapun teori mengenai Pertumbuhan Ekonomi suatu wilayah akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Teori Ekonomi Klasik

Ahli-ahli ekonomi klasik, di dalam menganalisis masalah-masalah pembangunan, terutama ingin mengetahui tentang sebab-sebab perkembangan ekonomi dalam jangka panjang dan corak proses pertumbuhannya. Berikut ini beberapa teori dari para ahli ekonomi klasik (Sukirno, 2000).

a. Pandangan Adam Smith

Smith mengemukakan beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yang penting perannya dalam pertumbuhan ekonomi. Pandangan yang *pertama* adalah peranan sistem pasar bebas, Smith berpendapat bahwa sistem mekanisme pasar akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh. *Kedua*, perluasan pasar. Perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan memproduksi dengan tujuan untuk menjual kepada masyarakat dan mencari untung. *Ketiga*, spesialisasi dan kemajuan teknologi. Perluasan pasar dan perluasan ekonomi yang digalakkannya akan memungkinkan dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Seterusnya spesialisasi dan perluasan kegiatan ekonomi akan menggalakkan perkembangan teknologi dan produktivitas meningkat. Kenaikan produktivitas akan menaikkan pendapatan pekerja dan kenaikan ini akan memperluas pasaran.

b. Pandangan Malthus dan Ricardo

Tidak semua ahli ekonomi Klasik mempunyai pendapat yang positif mengenai prospek jangka panjang pertumbuhan ekonomi. Malthus dan Ricardo berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan kembali ke tingkat subsisten. Jumlah penduduk atau tenaga kerja adalah berlebihan apabila dibandingkan dengan faktor produksi yang lain, penambahan penduduk akan menurunkan produksi per kapita dan taraf kemakmuran masyarakat. Maka,

pertambahan penduduk yang terus berlaku tanpa diikuti pertambahan sumber-sumber daya yang lain akan menyebabkan kemakmuran masyarakat mundur kembali ke tingkat subsisten.

c. Teori Schumpeter

Pada permulaan abad ini berkembang pula suatu pemikiran baru mengenai sumber dari pertumbuhan ekonomi dan sebabnya konjungtur berlaku. Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus menerus tetapi mengalami keadaan dimana adakalanya berkembang dan pada lain waktu mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha melakukan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan mereka menghasilkan barang dan jasa. Untuk mewujudkan inovasi yang seperti ini, investasi akan dilakukan dan pertambahan investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi.

d. Teori Harrod-Domar

Teori menunjukkan hubungan antara analisis Keynes dengan teori Harrod-Domar, dimana teori Keynes menjelaskan bahwa pada hakikatnya menerangkan bahwa pembelanjaan agregat akan menentukan tingkat kegiatan perekonomian. Analisis yang dikembangkan oleh Keynes menunjukkan bagaimana konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan akan menentukan tingkat pendapatan nasional. Analisis Harrod-Domar bahwa sebagai akibat investasi yang dilakukan tersebut pada masa berikutnya kapasitas

barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah. Seterusnya teori Harrod-Domar dianalisis keadaan yang perlu wujud agar pada masa berikutnya barang-barang modal yang tersedia tersebut akan sepenuhnya digunakan. Sebagai jawapan tersebut menurut Harrod-Domar agar seluruh barang modal yang tersedia digunakan sepenuhnya, permintaan agregat haruslah bertambah sebanyak kenaikan kapasiti barang-barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi di masa lalu.

## 2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Dalam analisis Neo-Klasik, permintaan masyarakat tidak menentukan laju pertumbuhan. Dengan demikian menurut teori Neo-Klasik, sampai dimana perekonomian akan berkembang, tergantung kepada pertambahan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi (Jhingan, 2004). Ahli ekonomi yang menjadi perintis pengembangan teori tersebut antara lain:

### a. Teori J.E. Meade

Profesor J.E. Meade dari Universitas Cambridge membangun suatu model pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana bentuk paling sederhana dari sistem ekonomi klasik akan berperilaku selama proses pertumbuhan ekuilibrium.

### b. Teori Solow

Menurut Solow, keseimbangan yang peka antara  $G_w$  dan  $G_n$  tersebut timbul dari asumsi pokok mengenai proporsi produksi yang dianggap tetap, suatu keadaan yang memungkinkan untuk mengganti buruh dengan modal. Jika asumsi itu dilepaskan, keseimbangan tajam antara  $G_w$  dan  $G_n$  juga lenyap bersamanya. Oleh karena itu, Solow membangun model pertumbuhan jangka panjang tanpa asumsi proporsi produksi yang tetap. Dengan asumsi tersebut, Solow menunjukkan dalam modelnya bahwa dengan koefisien teknik yang bersifat variabel, rasio modal buruh akan cenderung menyesuaikan dirinya dalam perjalanan waktu ke arah rasio keseimbangan.

Selain kedua teori diatas, terdapat pula teori-teori lain mengenai pertumbuhan ekonomi, diantaranya:

#### 1. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat

Teori ini diperkenalkan oleh Samuelson (1955), ia melihat bahwa setiap wilayah perlu melihat sektor/komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh.

## 2. Teori Basis Ekspor Richardson

Teori basis ekspor murni dikembangkan dalam kerangka ilmu ekonomi regional. Penganjur pertama teori ini adalah Tiebout. Teori ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan *service* (pelayanan) atau sektor non basis. Menurutnya, besarnya basis ekspor adalah fungsi terbalik dari besarnya suatu daerah. Artinya, makin besar suatu daerah, eksportnya semakin kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan, demikian pula impornya. Ekspor jelas bukan satu-satunya faktor yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Ada banyak unsur lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah seperti bantuan dari pemerintah pusat, investasi dari luar, dan peningkatan produktivitas masyarakat.

### **2.1.4.4 Metode Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk mengetahui maju tidaknya suatu perekonomian diperlukan adanya suatu alat pengukur yang tepat. Alat pengukur pertumbuhan perekonomian ada beberapa macam, diantaranya:

#### 1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Cara perhitungan PDB bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:

##### a. Pendekatan Pengeluaran

$$PDB = C + I + G + (X - Z)$$

- Dimana: PDB : Produk Domestik Bruto  
 C : Konsumsi yang dikeluarkan oleh rumah tangga  
 I : Investasi sektor usaha  
 G : Pengeluaran pemerintah  
 (X - Z) : Ekspor dan Impor

#### b. Pendekatan Pendapatan

$$PDB = Sewa + Upah + Bunga + Laba$$

- Dimana: PDB : Produk Domestik Bruto  
 Sewa : Pendapatan pemilik faktor produksi tetap  
 Upah : Upah untuk tenaga kerja  
 Bunga : Bunga untuk pemilik modal  
 Laba : Laba untuk pengusaha

#### 2. Produk Domestik Bruto per Kapita (Pendapatan per Kapita)

Produk Domestik Bruto per Kapita merupakan jumlah PDB nasional dibagi dengan jumlah penduduk atau dapat disebut juga sebagai PDB rata-rata atau PDB per kepala. Untuk menghitung PDB per kapita maka dapat dilakukan dengan perhitungan:

$$GDP \text{ per Kapita} = \frac{GDP \text{ tahun } x}{Jumlah \text{ Penduduk tahun } x}$$

#### 3. Pendapatan per Jam Kerja

Pendapatan per jam kerja merupakan upah atau pendapatan yang dihasilkan per jam kerja. Biasanya suatu negara yang mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja lebih tinggi daripada di

negara lain, boleh dikatakan negara yang bersangkutan lebih maju daripada negara yang satunya.

Beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi di atas dipilih oleh suatu negara dengan keadaan ekonomi di negara tersebut. Peningkatan atau penurunan GDP ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan lingkungan, teknologi dan faktor sosial. Sedangkan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah biasanya yang sering dijadikan acuan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang ada pada umumnya dalam waktu satu tahun. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah menggunakan data PDRB dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut.

$$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

Dimana: G : Laju pertumbuhan ekonomi

PDRB<sub>0</sub> : PDRB atas dasar harga kosntan pada suatu tahun

PBRB<sub>1</sub> : PDRB atas dasar harga konstan pada tahun sebelumnya

Menurut BPS, cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung

menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.

2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku, yaitu jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

## **2.1.5 Tingkat Kemiskinan**

### **2.1.5.1 Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers dalam Suryawati (2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan (*proper*)
2. Ketidakberdayaan (*powerless*)
3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)

4. Ketergantungan (*dependence*)
5. Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis

Menurut Kuncoro (2003) kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai “ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum”. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004).

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu negara, terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang atau negara ketiga, dimana masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak muncul secara mendadak, namun memiliki latar belakang yang cukup panjang dan rumit sehingga sangat sulit untuk mengetahui akar dari masalah kemiskinan itu sendiri. Sedangkan kemiskinan bersifat multidimensional artinya melihat dari banyaknya kebutuhan manusia yang bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki aspek primer berupa kemiskinan akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan serta aset sekunder berupa kemiskinan akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Sebagai dampak dari sifat kemiskinan tersebut tergambar

dalam bentuk kekurangan gizi, air dan perumahan yang tidak sesuai, pelayanan kesehatan yang kurang baik serta rendahnya tingkat pendidikan.

#### **2.1.5.2 Teori Kemiskinan**

Kemiskinan adalah fenomena yang sering kali dijumpai dalam bermasyarakat. Kemiskinan juga sering dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata, padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Berbagai program dan kebijakan telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, tetapi statistik angka kemiskinan cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Rendahnya tingkat kehidupan dijadikan sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu rantai dalam lingkaran kemiskinan (Andre Bayo, 2007).

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensi sehingga dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kemiskinan itu bersifat multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan serta keterampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk

kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad, 2004).

Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok tertentu. Kaum wanita pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan. Dalam rumah tangga miskin, kaum wanita sering menjadi pihak yang menanggung beban kerja yang lebih banyak daripada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak mereka juga menderita akibat adanya ketidakmerataan tersebut dan kualitas hidup mereka terancam oleh karena tidak tercukupinya gizi, pemerataan kesehatan dan pendidikan. Selain itu timbulnya kemiskinan sangat sering terjadi pada kelompok-kelompok minoritas tertentu.

Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan (*inequality*). Kemiskinan berkaitan dengan standar hidup yang absolute dari masyarakat tertentu, sedangkan ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat pada tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja dan tingkat kemiskinan sangat tinggi (Kuncoro, 2006).

### **2.1.5.3 Penyebab Kemiskinan**

Menurut Shrap dalam Kuncoro (2006) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. *Ketiga*, penyebab kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Menurut Todaro (2003) kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi ada enam karakteristik sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
2. Pendapatan per kapita negara-negara Dunia Ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat bahkan ada beberapa yang mengalami stagnansi.
3. Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata.
4. Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.
6. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Kartasmita dalam Rahmawati (2006) mengemukakan bahwa, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, yaitu:

1. Rendahnya Taraf Pendidikan

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

2. Rendahnya Derajat Kesehatan

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.

3. Terbatasnya Lapangan Kerja

Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.

4. Kondisi Keterisolasian

Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Bappenas menguraikan indikator-indikator penyebab kemiskinan seperti:

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak fasilitas kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal.
3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung,
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.
5. Terbatasnya akses layanan kesehatan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan dan pertanian lahan

kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak.

6. Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air.
7. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian.
8. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam.
9. Lemahnya jaminan rasa aman. Hal ini terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerah konflik.
10. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi.

#### **2.1.5.4 Ukuran Kemiskinan**

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah *Head Count Index*

(HCI) yaitu jumlah dan presentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Selain *Head Count Index* ( $P_0$ ) terdapat juga indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan., yaitu ideks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*- $P_1$ ) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke.

$$P_a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{z - y_i}{z} \right)^a$$

- Dimana:
- Z : Garis Kemiskinan
  - I : Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
  - Q : Banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
  - N : Jumlah penduduk
  - $\alpha$  : 0,1,1
  - $\alpha = 0$  : *Head Count Index* ( $P_0$ )
  - $\alpha = 1$  : *Poverty Gap Index* ( $P_1$ )
  - $\alpha = 2$  : *Poverty Severity Index* ( $P_2$ )

*Head Count Index* ( $P_0$ ) merupakan jumlah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Demikian juga sebaliknya, bila angka  $P_0$  besar maka menunjukkan tingginya jumlah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

*Poverty Gap Index (P<sub>1</sub>)* merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka ini memperlihatkan jurang (*gap*) antara pendapatan rata-rata yang diterima penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan secara rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Semakin tinggi angka ini maka semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

*Poverty Saverity Index (P<sub>2</sub>)* memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Angka ini memperlihatkan sensitivitas distribusi pendapatan antar kelompok miskin. Semakin kecil angka ini menunjukkan distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata.

Kemiskinan dapat juga diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi per bulan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Untuk mengidentifikasi kemiskinan yang sering digunakan adalah garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi

dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 komoditi di pedesaan.

Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Arsyad, 2016).

#### 1. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya, konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro dalam Arsyad, 2016).

## 2. Kemiskinan Relatif

Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan.

### **2.1.6 Kinerja Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mohamad Mahsun (2011) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakutansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim, 2012).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu : pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah, salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan antara lain Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

#### **2.1.6.1 Rasio Efektivitas**

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Pengukuran Efektivitas**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
(x > 100%)	Efektif
(x = 100%)	Efektivitas Berimbang
(x < 100%)	Tidak efektif

*Sumber: Mahmudi, 2010*

### 2.1.6.2 Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2013) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerinta daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Pengukuran Efisiensi**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
100% Ke atas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

*Sumber: Mohammad Mahsun, 2011*

### 2.1.6.3 Rasio Kemandirian

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian maka semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan P}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

*Sumber: Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina, 2011*

Adapun penjelasan dari pola-pola tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

2. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

#### **2.1.6.4 Rasio Keserasian**

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pmebangunannya secara Optimal. Menurut Halim (2012) semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti presentase Belanja Investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

##### **1. Rasio Belanja Operasi**

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan

belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60 – 90%.

Menurut Mahmudi (2010) di dalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

## 2. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal juga bersifat rutin.

Menurut Mahmudi (2010) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5 – 20%. Rasio belanja modal dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Model terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi

oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

#### **2.1.6.5 Rasio Pertumbuhan**

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Jika terjadi pertumbuhan yang positif berarti trend atau kecenderungannya meningkat, namun jika pertumbuhannya negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

Menurut Mahmudi (2010), rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

Menurut Halim (2008), untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti

semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meingkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang Pemekaran Wilayah di Indonesia yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis, Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nyayu Neti Arianti dan Indra Cahyadinata. Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu. AGRISEP 14 No. 2 September 2014 Hal: 159 – 176.	Analisis dampak pemekaran daerah, menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan	Mengukur Kinerja Ekonomi sebelum dan sesudah pemekaran wilayah, menggunakan variabel PDB per kapita dan lokasi penelitian	Dari hasil uji beda kinerja ekonomi di wilayah Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pemekaran tidak berbeda, PDB per kapita setelah pemekaran lebih tinggi dari sebelumnya, dan indeks kemiskinan adalah sama antara sebelum dan sesudah pemekaran wilayah
2	Raden Hady Santika. Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja Dan Pemerataan Ekonomi di	Analisis dampak pemekaran daerah	Menggunakan variabel kinerja ekonomi, kinerja pelayanan	Kinerja ekonomi, kinerja pelayanan publik dan pemerataan ekonomi setelah pemekaran daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten Lombok Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Volume 3- Nomor 1, April 2018, [Hlm. 15 – 23].		publik, pemerataan ekonomi dan lokasi penelitian	mengalami peningkatan. Pemekaran daerah di wilayah Lombok Utara memberikan dampak positif bagi pembangunan di wilayah tersebut.
3	Dr. Ali, M. Ag., Sitti Mawar, S.Ag., M. H Nurdin Syah. Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau menurut Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Petita, Volume 3, Nomor 2, Januari – Juni 2018.	Analisis dampak pemekaran daerah.	Menggunakan variabel kinerja Pelayanan Publik dan lokasi penelitian	Pemekaran daerah membawa implikasi positif dalam bentuk pengakuan sosial, politik dan kultural masyarakat daerah melalui kebijakan pemekaran, entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, memperoleh pengakuan sebagai daerah otonom baru.
4	Sella Ayu Wandira Harahap. Dampak Pemekaran Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. Jurnal Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, April 2014	Analisis dampak pemekaran daerah	Menggunakan variabel infrastruktur dan lokasi penelitian.	Pembangunan infrastruktur berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, mesjid sedangkan infrastruktur untuk pelayanan administrasi kepada masyarakat masih belum ada. Dampak dari adanya pemekaran

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				terasa sangat signifikan jika dilihat dari pembangunan infrastruktur, dimana masyarakat merasakan dampak yang sangat positif yaitu kemudahan dalam mengakses lokasi dan melaksanakan mobilitas.
5	Alinapia. Pemerakan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sumatera Utara. Disertasi, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Padangsidempuan, 2013.	Analisis Perkembangan daerah pasca pemekaran	Implikasi pemekaran daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan lokasi penelitian	Pelaksanaan pemekaran daerah di Sumatera Utara berjalan dengan baik, demikian juga implikasi pemekaran daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti bahwa di daerah penelitian sudah ada daerah pemekaran yang dianggap sebagai daerah otonom bisa (Kabupaten Serdang Begadai) dan kedua daerah penelitian tersebut juga merupakan daerah sepuluh besar terbaik di Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan.
6	Abdul Hakim. Analisis Dampak	Analisis Dampak	Menggunakan variabel	Tidak ada perbedaan yang

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Jurnal Fekon, Vol. 4 No.1, Februari 2014.</p>	<p>Pemekaran Daerah dan menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Peningkatan Pelayanan Publik dan Lokasi Penelitian</p>	<p>signifikan terhadap kinerja perekonomian daerah Kabupaten Meranti setelah melakukan pemekaran, dampak dari pemekaran tersebut belum mengindikasikan positif. Hasil percepatan pertumbuhan ekonomi sementara kinerja layanan publik ada perbedaan signifikan setelah pemekaran. Selain itu peningkatan kualitas layanan publik lokal juga menunjukkan hasil positif.</p>
7	<p>Rini Archda Saputri. Analisis Keberhasilan Pemekaran Daerah. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Volume 14 Nomor 3, September 2016, hlm 157-236</p>	<p>Menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Analisis Keberhasilan pemekaran, menggunakan variabel kualitas pelayanan publik dan lokasi penelitian</p>	<p>Keberhasilan pemekaran daerah yang dicapai oleh Kabupaten Siak ditinjau dari aspek antara lain: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Rasio PDRB per kapita terhadap PDRB Provinsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten induk, dan rendahnya angka kemiskinan.</p>
8	<p>Ida Ayu Purba Riani, M. Pudjihardjo.</p>	<p>Analisis Dampak</p>	<p>Menggunakan variabel</p>	<p>Pemekaran daerah berhasil</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan per Kapita, Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Wilayah di Provinsi Papua. Jurnal Bumi Lestari, Volume 12 Nomor 1, Februari 2012 hlm. 137 – 148</p>	<p>Pemekaran Daerah dan menggunakan variabel tingkat kemiskinan</p>	<p>Pendapatan per Kapita, Kesenjangan Antar Daerah dan Lokasi Penelitian</p>	<p>mengurangi angka kemiskinan di perkotaan namun gagal mengurangi kemiskinan di pedesaan. Secara umum pemekaran daerah berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Papua. Pemekaran daerah juga kurang berhasil atau kurang signifikan terhadap kesenjangan pembangunan antar daerah di Provinsi Papua.</p>
9	<p>Samuel Randy Tapparan, Abdul Wahab. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Pemekaran Kabupaten Toraja Utara dari Tana Toraja). Jurnal Office: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran, Vol. 5 Nomor 1, Januari – Juni 2019. Hal 1 – 6</p>	<p>Analisis Dampak Pemekaran Daerah dan menggunakan Variabel Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Hanya menggunakan Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Lokasi Penelitian</p>	<p>Pemekaran wilayah memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara.</p>
10	<p>Sutojo, Adi. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dalam</p>	<p>Analisis Dampak Pemekaran</p>	<p>Menggunakan variabel Tingkat</p>	<p>Terjadi pertumbuhan ekonomi yang</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perspektif Otonomi Daerah. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, Vol. 4 Nomor 4, Desember 2015.	Daerah dan menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi	Pelayanan Publik dan Lokasi Penelitian	belum terlalu signifikan pada Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai daerah otonom, sehingga dampak pemekaran yang terjadi belum dapat diukur dengan pasti. Sedangkan untuk pelayanan publik pasca pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah mengaami peningkatan yang cukup pesat.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan pemekaran wilayah tidak lepas dari adanya asas desentralisasi. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diterbitkannya Undang-Undang tentang Desentralisasi menambah gencar dilakukannya pemekaran wilayah. Pelaksanaan pemekaran di suatu wilayah akan menimbulkan berbagai dampak terhadap sektor ekonomi, sosial dan kinerja keuangan pemerintah baik di daerah induk maupun di daerah pemekarannya.

Dilihat dari sektor ekonomi, adanya pemekaran wilayah bisa menimbulkan berbagai dampak yang terjadi, salah satunya dampak terhadap

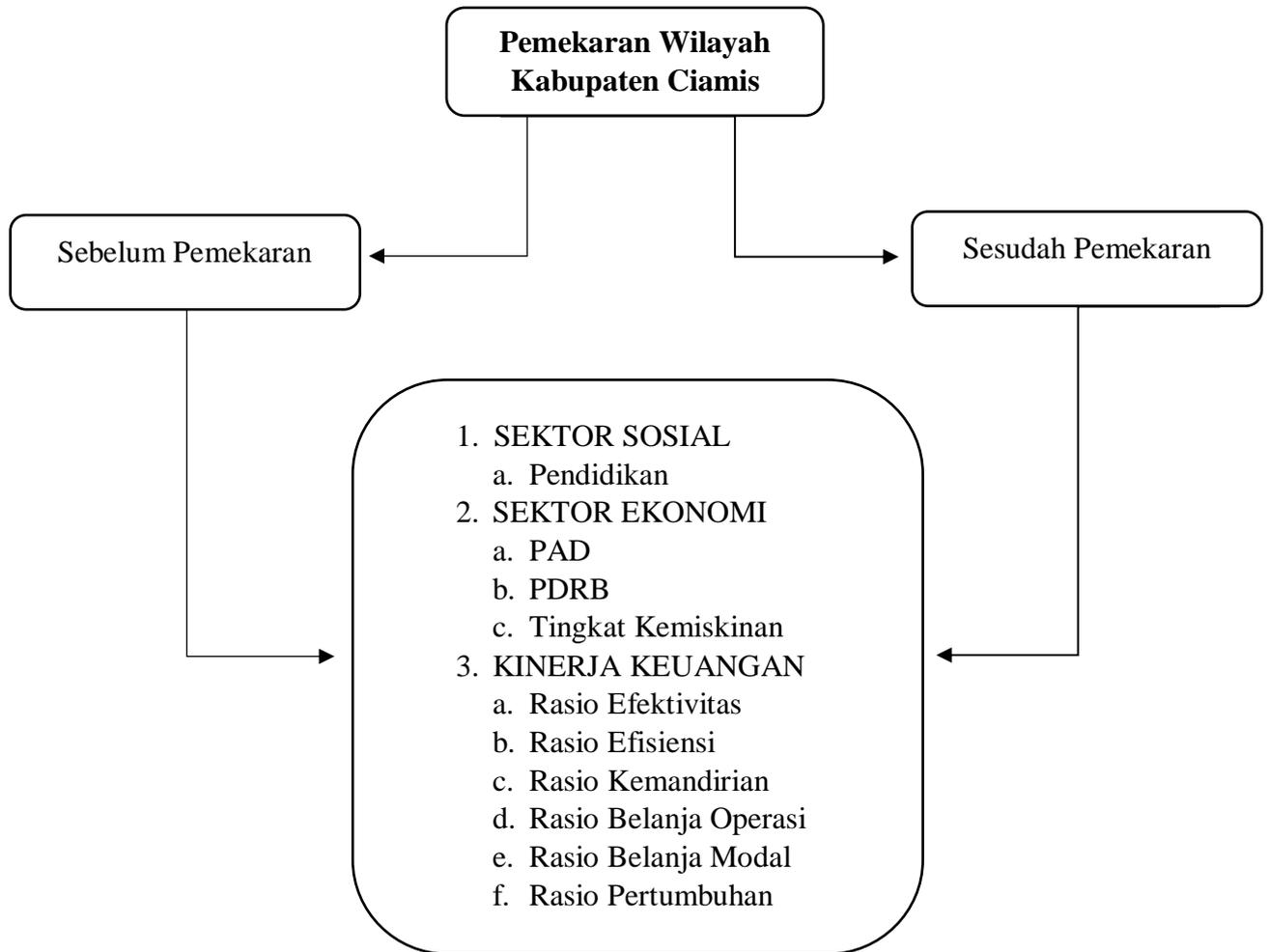
Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan PDRB. Menurut Nurlan Darise (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Adanya pemekaran wilayah jelas akan mengurangi angka penerimaan asli daerah di suatu wilayah. Namun, jika daerah tersebut bisa menggali potensi-potensi lain di wilayahnya, hilangnya angka penerimaan asli daerah dari wilayah yang di mekarkan akan tergantikan oleh penerimaan dari sektor lainnya. Begitu pula dengan laju pertumbuhan ekonomi. Adanya pemekarn wilayah bisa menjadi faktor yang mempercepat laju pertumbuhan ekonomi atau bahkan bisa menjadi faktor penghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Dari sektor sosial, adanya pemekaran wilayah juga akan mempengaruhi berbagai bidang di sektor sosial. Salah satu contohnya adalah pengaruh pemekaran wilayah terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan. Sama hal nya seperti pada sektor ekonomi, dampak pemekaran wilayah juga bisa berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif. Jika setelah pemekaran tingkat pendidikan meningkat dan tingkat kemiskinan menurun, berarti pemekaran wilayah membawa dampak positif pada sektor sosial. Sebaliknya, jika setelah adanya pemekaran wilayah tingkat pendidikan menurun dan tingkat kemiskinan meningkat, berarti pemekaran wilayah membawa dampak negatif bagi daerah induk maupun daerah pemekarannya.

Pemekaran wilayah juga akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya pemekaran wilayah jelas akan merubah arus keuangan daerah. Pendapatan dan pengeluaran daerah juga pasti akan mengalami perubahan. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah bisa dilihat dari rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas PAD, rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Jika dari semua rasio itu menunjukkan kemajuan, maka pemekaran wilayah berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dengan kata lain, pemekaran wilayah dapat mempengaruhi sektor sosial ekonomi dan kinerja keuangan pemerintahan daerah di daerah yang dimekarkan maupun di daerah induk. Bagi daerah induk, pemekaran wilayah dapat mengurangi beban pemerintah dalam pengelolaan dan pemerataan di daerahnya. Walaupun daerah induk tersebut akan kehilangan berbagai sumber pemasukannya, tetapi jika dapat menggali potensi-potensi lain yang ada di daerah tersebut maka proses pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan tetap berlanjut. Di sisi lain, daerah otonomi baru akan diberi keleluasaan dalam mengelola potensi-potensi di daerahnya. Jika pemerintahan di daerah otonomi baru tersebut mampu mengelola sumber daya yang ada di daerahnya, pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pun akan terlaksana di daerah otonomi baru tersebut.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian yang kebenarannya harus di uji secara empiris. Hipotesis merupakan suatu penjelasan dari beberapa masalah yang sedang dipelajari yang dapat dibenarkan atau ditanggihkan.

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang ada, maka ditarik suatu hipotesis, diantaranya sebagai berikut:

1. Diduga pemekaran Kabupaten Ciamis berdampak terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi dan kinerja keuangan pemerintahan daerah.
2. Diduga pemekaran Kabupaten Ciamis berdampak signifikan terhadap perubahan rata-rata pada aspek sosial pendidikan (Angka Melek Huruf).
3. Diduga pemekaran Kabupaten Ciamis berdampak signifikan terhadap perubahan rata-rata pada kondisi ekonomi (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Tingkat Kemiskinan).
4. Diduga pemekaran Kabupaten Ciamis berdampak signifikan terhadap perubahan rata-rata pada Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.